

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2022



EKSEKUTIF SUMMARY

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2022 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Bertolak dari kondisi faktual bahwa komunikasi dan informatika serta pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah “Nusa Tenggara Timur Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan pada Misi ke V yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan program-program komunikasi dan informatika yang tertuang dalam RENSTRA.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah “Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah”.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai Sasaran-Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- a. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- b. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah;
- d. Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi;
- e. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2022 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2022.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini disusun berdasarkan komitmen dan motivasi semua unit kerja, pimpinan dan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan perjanjian kinerja secara konsisten serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. ABA MAULAKA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196302051986031031

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	2
B.	Maksud dan Tujuan	3
C.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	3
D.	Sistematika Penulisan LKIP	14
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	15
A.	Rencana Strategi Organisasi	15
1.	Visi	15
2.	Misi	15
3.	Tujuan dan Sasaran	15
B.	Rencana Kerja (RKT) Tahun 2022	17
C.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	17
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
A.	Capaian Kinerja Organisasi	20
1.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas	21
2.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD	22
3.	Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional	23
4.	Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas	24
5.	Permasalahan dan Solusi	30
6.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja	39
B.	Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran	44
1.	Pendapatan	44
2.	Belanja	45
BAB. IV	PENUTUP	54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran – saran	54

DAFTAR TABEL

1	Tabel Status Kepegawaian	4
2	Tabel Jabatan PNS	4
3	Tabel Jabatan Struktural PNS	5
4	Tabel PNS sesuai Pangkat dan Golongan	5
5	Tabel PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan	5
6	Tabel Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan	5
7	Tabel Pegawai menurut Gender	6
8	Tabel Pejabat Fungsional	6
9	Tabel Jumlah Aset	6
10	Tabel Perangkat Keras Komputer	7
11	Tabel Sarana Pendukung	7
12	Tabel Aset Tak Berwujud	7
13	Tabel Rencana Kerja Tahun 2022	17
14	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
15	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas	21
16	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD	22
17	Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional	23
18	Tabel Cakupan Layanan Internet	28
19	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
20	Tabel Analisis Program/Kegiatan dan Anggaran Pencapaian Perjanjian Kinerja	39
21	Tabel Realisasi Pendapatan	44
22	Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja	45
23	Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan	46

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	4
---	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB). Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, implemementasi SAKIP sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi Pemerintah di lingkungannya setiap tahun dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD yang berjalan selama 1 (satu) tahun. LKIP ini berisi besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yang bisa dijadikan bahan evaluasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2022 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Bertolak dari kondisi faktual bahwa komunikasi dan informatika serta pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah :

“NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”,

dan pada Misi ke V yaitu:

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut di atas, telah disusun Rencana Strategi berdasarkan kondisi obyektif daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan Tujuan dan Sasaran demi mewujudkan cita-cita sesuai Visi dan Misi yang diemban, mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, dan karena itu uraian-uraian selanjutnya dalam laporan ini merupakan gambaran untuk mempertanggungjawabkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tahun Anggaran 2022;
2. Deskripsi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
3. Umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan ;
4. Sebagai penilaian terhadap Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan informatika yang tertuang dalam RENSTRA, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

“MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITUGASKAN KEPADA DAERAH”.

Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan Informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 (satu) orang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), 3 (tiga) orang Sub Bagian/Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Kepegawaian

Jumlah ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 sebanyak 88 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel. 1
Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Presentase
1	PNS	69 orang	78,40 %
2	Tenaga Kontrak	19 orang	19,60 %
	Jumlah	88 orang	100 %

b. Komposisi Jabatan PNS

Tabel. 2
Jabatan PNS

No	Jabatan PNS	Jumlah	Presentase
1	Jabatan Struktural	9 orang	13,04 %
2	Jabatan Fungsional Tertentu	13 orang	18,84 %
3	Tenaga Fungsional Umum	47 orang	68,12 %
	Jumlah	69 orang	100 %

c. Komposisi Jabatan Struktural PNS

Tabel. 3
Jabatan Struktural PNS

No	Jabatan PNS	Jumlah	Presentase
1	Eselon II	1 orang	11,11 %
2	Eselon III	5 orang	55,56 %
3	Eselon IV	3 orang	33,33 %
	Jumlah	9 orang	100 %

d. Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan

Tabel. 4
PNS sesuai Pangkat dan Golongan

No	Golongan PNS	Jumlah	Presentase
1	Golongan IV	7 orang	10,14 %
2	Golongan III	48 orang	69,57 %
3	Golongan II	13 orang	18,84 %
4	Golongan I	1 orang	1,45 %
	Jumlah	69 orang	100 %

e. Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

Tabel. 5
PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan PNS	Jumlah	Presentase
1	Magister	10 orang	14,49 %
2	Sarjana	33 orang	47,83 %
3	D-III	1 orang	1,45 %
4	SMU	22 orang	31,88 %
5	SMP	2 orang	2,90 %
6	SD	1 orang	1,45 %
	Jumlah	69 orang	100 %

f. Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

Tabel. 6
Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan non PNS	Jumlah	Presentase
1	Sarjana	9 orang	47,37 %
2	Diploma	3 orang	15,79 %
3	SMU	7 orang	36,84 %
	Jumlah	19 orang	100 %

g. Komposisi Pegawai menurut Gender

Tabel. 7
PNS Menurut Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	38 orang	55,07 %
2	Wanita	31 orang	44,93 %
	Jumlah	69 orang	100 %

h. Jenis Pejabat Fungsional Tertentu

Tabel. 8
Pejabat Fungsional

No	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah	Keterangan
1	Pranata Humas	3 orang	23,08 %
2	Pustakawan	1 orang	7,69 %
3	Perencana	1 orang	7,69%
4	Pranata Komputer	5 orang	38,46 %
5	Manggala Informatika	3 orang	23,08 %
	Jumlah	13 orang	100 %

4. Keadaan sarana prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

Tabel. 9
Jumlah Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	4	Bidang	
2	Alat-alat berat	-		
3	Alat-alat angkutan	4	Unit	
4	Alat-alat bengkel dan alat ukur	-		
5	Alat kantor dan rumah tangga	-	Unit	
6	Alat studio dan komunikasi	2	Unit	
7	Alat-alat laboratorium	-		
8	Bangunan gedung	1	Gedung	
9	Jaringan	4	Unit	

Tabel. 10
Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Server	7	Unit	Baik
2	PC/Komputer	46	Unit	Baik
3	Laptop	25	Unit	Baik
4	Router	49	Unit	Baik
5	Printer	26	Unit	Baik

Tabel. 11
Jumlah Sarana Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	LCD Proyektor	4	unit	Baik
2	Kamera	1	unit	Baik
3	Kamera Shoting	2	unit	Baik
4	Web Camera	4	unit	Baik

Tabel. 12
Aset Tak Berwujud

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Notifikasi aplikasi e-Nadi	1	unit	Baik
2	Server anti virus	3	unit	Baik
3	Panel untuk server	1	unit	Baik
4	Anti virus	1	unit	Baik
5	Web CMS	4	unit	Baik
6	Aplikasi Video Editing	1	unit	Baik
7	Windows 2016 Profesional	1	unit	Baik
8	Aplikasi GIS	1	unit	Baik
9	Microsoft Office 2016	1	unit	Baik
10	Aplikasi E-Nadi NTT	2	unit	Baik
11	Aplikasi E-Absensi	1	unit	Baik
12	Aplikasi TTE	1	unit	Baik
13	Secure Socket Layer	1	unit	Baik

Demikian gambaran eksisting dukungan infrastruktur TIK, SDM dan prasarana pendukung lainnya sampai dengan kondisi tahun 2022.

D. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dengan mengacu pada berbagai regulasi tersebut diatas maka dalam kerangka pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT secara atributif bertanggungjawab mempersiapkan infrastruktur Jaringan portal di instansi pemerintah. Infrastruktur portal pemerintah meliputi jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang menjamin konektivitas yang aman, handal, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah serta terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik yang efektif.

Peran ini telah dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur NTT Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan *e-Government* dilingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut; untuk mengetahui kondisi objektif pelaksanaan *e-Government* pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka peletakan kebijakan pembangunan dan pengembangan *e-Government*. Untuk mengetahui kondisi obyektif penerapan e-Government (SPBE) saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka telah dilaksanakan assesmen melalui wawancara dan pengisian kuisisioner dan pengamatan di Perangkat Daerah responden di setiap Perangkat Daerah.

Tahapan *assesment* menggambarkan fakta terkait kondisi Infrastruktur Jaringan TIK, Aplikasi *e-Government*, keamanan TIK, Sumber Daya (SDM) TIK dan kondisi ideal yang diinginkan. Pelaksanaan *assesment* terhadap *e-Government* (SPBE) di Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan fakta empiris yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan pengembangan SPBE sebagai berikut:

1. Infrastruktur Jaringan TIK

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini pembangunan infrastruktur jaringan pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Provinsi NTT masih menjadi hambatan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO), termasuk internet hal ini disebabkan karena ego sektoral dari masing-masing Perangkat Daerah yang membangunnya secara parsial. Hal ini telah memberikan konsekuensi logis, terkait hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya inefisiensi anggaran dalam pengelolaan *e-Government* baik pelaksanaan aplikasi maupun pemafaatan jaringan internet;
- b. Telah menjadi kendala utama dalam rangka membangun konektivitas dan integrasi pengelolaan dan pelaksanaan *e-Government*;

- c. Aspek keamanan data dan informasi tidak dijamin untuk terlaksana dengan baik;
- d. Kualitas pelayanan publik akan menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Untuk Perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT ke depan perlu memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan sesuai standar seperti Ruang TIK, Sistem Pendukung, Sistem M/E (Listrik dan UPS), Sistem komunikasi dan jaringan, Topologi jaringan, bandwidth & kapasitas jaringan serta security jaringan. Prioritas untuk Tahun 2019 akan menyediakan Bandwidth dan kapasitas jaringan bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

2. Aplikasi *e-Government*

Salah satu aspek dalam implementasi *e-Government* (SPBE) adalah ketersediaan informasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah membutuhkan pengembangan sistem informasi secara elektronik untuk memberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam proses birokrasi. Proses memperoleh informasi tersebut diperoleh dari berbagai aplikasi informatika atau aplikasi sistem informasi. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan *e-Government* (SPBE). Dapat digambarkan bahwa kondisi saat ini terdapat beberapa aplikasi sistem informasi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dimana aplikasi-aplikasi tersebut tersebar pada beberapa Perangkat Daerah.

Aplikasi *e-Government* (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. Kendala yang dialami saat ini terkait tata kelola sistem informasi, khususnya website, aplikasi umum antara lain tidak semua Perangkat Daerah memiliki unit khusus pengelola website, aplikasi yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu masih terdapat aplikasi umum yang dikelola Perangkat Daerah terkait yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih belum terintegrasi dengan aplikasi penunjang lainnya.

3. Keamanan Informasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

- a. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- b. Penyediaan kebijakan penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi;
- c. Pengelolaan dan perlindungan informasi;
- d. Pengelolaan sumber daya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
- e. Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi sistem informasi, mengelola keamanan teknologi informasi dan jaringannya akan menjadi semakin kompleks dan menantang. Pengamanan data/informasi harus memastikan terpenuhinya 3 syarat dasar sumber daya informasi, yaitu: (1) Kerahasiaan data/informasi; (2) Kebutuhan data/informasi dan (3). Ketersediaan data/informasi.

Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan system aplikasi yang dikembangkan;

2. Keamanan jaringan; dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak.

Untuk keamanan jaringan pada Perangkat Daerah berlangganan internet dengan berbagai jenis seperti; speedy, indihome, wifi.id dan astinet. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah belum menggunakan Fiber Optic (F/O) ataupun VPN;

3. Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan sever, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

4. SDM Pengelola TIK

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* (SPBE) di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan sumber daya manusia. Apabila SDM yang tersedia tidak memenuhi standar yang diinginkan maka hal ini akan menghambat implementasi *e-Government* (SPBE).

Berbagai kasus ditemukan bahwa pelaksanaan dan implementasi *e-government* terkadang menjadi kendala disebabkan karena tidak tersedianya SDM teknis teknologi informasi yang dapat menjalankan serta mengelola *e-government*. Dari hasil *asessment* berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT bahwa secara keseluruhan kondisi SDM TIK sebagai berikut; Teknik informatika 16 orang; Teknik komputer 12 orang; Manajemen informatika 7 orang; Sistem Informasi 7 orang dan; Teknik Elektro 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari ketersediaan SDM belum cukup memadai, namun dalam kenyataan bahwa disisi lain SDM yang ada pada Perangkat Daerah seringkali terjadi merangkap tugas antara pegawai menyebabkan penerepan sistem menjadi kendala. Selain itu terdapat juga kendala lain yaitu para ASN belum dibekali dengan pemahaman akan teknologi informasi, dimana ditemukan bahwa mereka sangat minim mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi dan informasi hal ini akan berdampak pada pemanfaatan aplikasi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut.

Dengan adanya perkembangan TI/ sistem informasi tersebut maka peningkatan kualitas SDM untuk pemahaman terhadap dan pengembangan dan pengelolaan TIK akan menjadi syarat mutlak supaya sistem yang telah dikembangkan menjadi berdaya guna.

5. Proses Audit Penerapan TIK di Provinsi NTT

Audit atau *asesment* atas proses bisnis, dan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini merupakan hal dasar yang perlu dilakukan dalam rangka menyusun Rencana Induk. Audit ini adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Induk ini, audit dilakukan melalui survei terhadap TUPOKSI Dinas Kominfo Provinsi NTT, Program Kegiatan, hingga aset TIK yang dimiliki, untuk disesuaikan dengan kebutuhan ideal penerapan *e-Government* yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, Aparatur Sipil di Provinsi NTT, perorangan, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan pemerintahan Provinsi NTT.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi; dan Audit Keamanan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Apabila mengacu kepada Perpres 95/2018, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi nantinya harus dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, diatur oleh Menteri Kominfo.

Secara ideal pula, Audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain audit infrastruktur, juga diperlukan Audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; untuk audit keamanan Aplikasi Umum, audit keamanan Aplikasi Khusus. Nantinya, Audit keamanan dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan, oleh lembaga cyber. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Untuk kasus Provinsi NTT, dari survei awal diketahui bahwa tidak terlalu banyak aplikasi, infrastruktur yang dapat diaudit sesuai arahan perpres, tetapi semangat untuk menuju ke sistem pemerintahan berbasis elektronik harus didukung melalui rencana induk tersebut. Adanya peraturan peralihan yang mengizinkan bahwa Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, maka menjadi peluang daerah untuk melakukan pengembangan dan memanfaatkan sistem e-government sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.

6. Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPBE untuk mendukung pelayanan publik adalah adanya pelayanan informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kondisi yang dihadapi adalah pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum optimal dilaksanakan berbasis TIK. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil perangkat daerah, program dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. Selain itu lembaga-lembaga yang perlu disiapkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk memfasilitasi terjadinya sengketa informasi juga belum dibentuk. Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal.

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- ❖ **BAB I. PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
 - D. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - E. Sistematika Penulisan LKIP
- ❖ **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**
 - A. Rencana Strategi Organisasi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan dan Sasaran
 - B. Rencana Kerja Tahun (RKT) Tahun 2022
 - C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- ❖ **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas
 - 2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD
 - 3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional
 - 4. Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas
 - 5. Permasalahan dan Solusi
 - 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja
 - B. Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran
 - 1. Pendapatan
 - 2. Belanja
- ❖ **BAB IV. PENUTUP**
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran – saran
- ❖ Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI

1. VISI :

Visi merupakan pedoman bagi upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi sebuah organisasi, karena itu Pemerintah Daerah Provinsi NTT menetapkan Visi sebagai berikut :

**“Nusa Tenggara Timur Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera dalam
Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

2. MISI :

Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan 5 Misi sebagai langkah konkretisasi terhadap Visi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan kegiatan secara fokus menjabarkan Misi yang ke-5 yaitu:

**“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik”**

3. TUJUAN DAN SASARAN :

Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran bekerja bersama-sama untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

3.1 TUJUAN :

- 1) Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- 2) Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi publik dan menyediakan dukungan infrastruktur TIK mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3.2 SASARAN

- 1) Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
- 2) Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- 3) Tersedianya kapasitas SDM SPBE.
- 4) Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.
- 5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik.
- 6) Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.
- 7) Meningkatnya penyebaran informasi dan keterbukaan informasi publik.
- 8) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
- 9) Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK.

Sasaran-sasaran tersebut diatas sudah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam Renstra Dinas Kominfo tahun 2018-2023.

B. RENCANA KERJA (RKT) TAHUN 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung terhadap arah kebijakan yang terkait dengan kegiatan komunikasi dan informatika sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD 2018 - 2023, dan merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel. 13

RENCANA KINERJA TAHUN 2022 (RKT 2022) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET
			2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	2,28 Index point	2,5 Index point
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	88,38	85
		Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	68,01	76 atau 4
		Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi.	100 %	75 %
		Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi.	100 %	100 %

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Berdasarkan RPJMD, RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, sebagai berikut :

Tabel. 14

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (PK 2022) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	2,28 Index point	2,5 Index point	$\frac{\text{Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada akhir RENSTRA}} \times 100$
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	88,38	85	$\frac{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada akhir RENSTRA}} \times 100$
		Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	68,01	76 atau 4	$\frac{\text{Nilai tingkat pengamanan informasi daerah yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai tingkat pengamanan informasi daerah yang direncanakan pada akhir RENSTRA}} \times 100$
		Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi.	100 %	75 %	$\frac{\text{Persentase sistem data statistik terintegrasi yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Persentase sistem data statistik terintegrasi yang rencanakan pada akhir RENSTRA}} \times 100$
		Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi.	100 %	100 %	$\frac{\text{Persentase layanan jaringan LAN dan Intranet terintegrasi yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Persentase cakupan internet di PD yang direncanakan pada akhir RENSTRA}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 12.015.006.801,-	Realisasi minimal 85 %
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8,479,538,572,-	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1,501,988,200,-	Realisasi minimal 85 %
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1,405,788,669,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 235,490,240,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 156,491,000,-	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan	Rp. 60.000.000,-	Realisasi minimal 90 %
2)	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	Rp.	
	1. -	Rp.	
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan		Realisasi minimal 90 %

- C. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100 %, kecuali terdapat kendala yang dapat dipertanggungjawabkan;
- D. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);
- F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (>80-90);
- G. Rata-rata Realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;
- H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
 - 2. TL temuan di bawah tahun 2020: Administrasi 100%, Non Administrasi minimal 75 %
 - 3. TL temuan di atas tahun 2020: Administrasi/Non Administrasi 90-100%
- I. Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001:2015;
- J. Jumlah Inovasi minimal 5 (lima) jenis;
- K. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi e-Nadi paling lambat tanggal 1 Maret 2022;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (75);
- N. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban suatu instansi untuk memberikan pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Oleh karena itu semua instansi Pemerintah tak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya harus memahami ruang lingkup akuntabilitasnya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah diatur tentang kewajiban Instansi Pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Sistem ini merupakan pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi yang membentuk siklus akuntabilita kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah menetapkan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah;
4. Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi;
5. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

Terhadap Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

Tabel 15.
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

No	IKU/Sasaran Strategis	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT .	Indeks	2,5	3,35	100
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	Nilai	85	76,99	90,58
3	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	Nilai	76 atau 4	77,479	100
4	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi.	%	75	100	100
5	Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.	%	100	100	100
Rata-rata					98,12

A.2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD-P 2018 -2023

Tabel 16.
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Tahun 2019 s/d 2022

IKU/Sasaran Strategis	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2019			2020			2021			2022		
		2018	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1,26 Skor	2,1 Indeks	2,24 Indeks	100%	2,1 Indeks	3,6 Indeks	100%	2,3 Indeks	2,28 Indeks	99,13%	2,5 Indeks	3,35 Indeks	100%
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	42,23 Skor	45 Skor	45 Skor	100%	59,65 Skor	59,65 Skor	100%	80 Nilai	88,38 Nilai	100%	85 Nilai	76,99 Nilai	90,58%
Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	-	-	-	-	52,48 Skor	52,48 Skor	100%	61 Skor	68,01 Skor	100%	76 Skor	77,479 Skor	100%
Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	-	-	-	-	-	-	45%	79,49 %	100%	75%	100%	100%
Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi	0	35%	35%	100%	50%	17,95%	35,90%	50%	100%	100%	100%	100%	100%

A.3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

Tabel 17.
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

No.	Sasaran/Indikator/Target Nasional		Sumber Data	IKU/Sasaran Strategis Diskominfo	Target 2022	Realisasi 2022
1.	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE Nasional	2,1	RKP Tahun 2022	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Indeks	3,35 Indeks
	Indeks SPBE (sesuai penilaian Menpan-RB dengan skala 1-5)	3,4	Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024			
2.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	40	RPJMN 2020-2024	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	75 Nilai	76,99 Nilai
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional	74,43	Hasil penilaian Lembaga Negara Komisi Informasi Pusat RI			
3.	Variabel Cyber Security Maturity (CSM)	2,52	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	76 atau 4 Nilai	77,479 Nilai
	Indeks Keamanan Informasi	II+				
	Persentase Pelaksanaan Persandian	76%				
4.	Pembangunan Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia	Kapasitas 1200	RPJMN 2020-2024	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	75%	100%
5.	Akses Internet (titik layanan publik)	41.739 lokasi	Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024	Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi	100%	100%

A.4. Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Evaluasi/penilaian bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan SPBE pada setiap instansi pemerintah. Upaya peningkatan penerapan SPBE tidak sekadar dengan melakukan penilaian melainkan mendorong pengintegrasian dan keterpaduan dalam menerapkan SPBE itu sendiri. Dalam aspek layanan, diharapkan SPBE akan mempunyai satu *interoperability* dalam pelaksanaan aplikasi-aplikasi di seluruh Perangkat Daerah. Penilaian penerapan SPBE ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 tergambar dari tercapainya indeks SPBE berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat nilai indeks sebesar 3,35. Nilai indeks mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,07 poin atau peningkatan sebesar 46,93 % sehingga jika disandingkan dengan target tahun 2022 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJMD, RENSTRA, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan target yang dijanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a. Telah tersedianya instrumen regulasi terkait Rancangan Pembangunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka menyelaraskan pembangunan SPBE pada setiap instansi Perangkat Daerah.
- b. Beberapa aplikasi umum berbagai pakai mulai diterapkan secara maksimal dan terintegrasi pada semua Perangkat Daerah antara lain untuk Bidang Perencanaan dan Penganggaran, Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan dan Pengaduan Masyarakat.
- c. Penerapan aplikasi khusus terintegrasi pada semua Perangkat Daerah antara lain Sistem Absensi Elektronik, Tata Naskah Dinas Elektronik (E-Nadi) dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sudah diimplementasikan.
- d. Telah adanya regulasi yang mengatur terkait Peta Proses Bisnis, Infrastruktur, Data dan Informasi, Layanan Aplikasi serta Keamanan SPBE.

- e. Penerapan SPBE telah menjadi salah satu indikator penting didalam mendukung area perubahan tata laksana Reformasi Birokrasi yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Dengan demikian maka mendorong seluruh perangkat daerah untuk segera mengimplementasikan SPBE guna mewujudkan ASN yang professional dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Adanya peran kerja kolaboratif antara Perangkat Daerah dan Dinas Kominfo Provinsi NTT didalam penerapan SPBE.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dilaksanakan untuk menilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor:09/KEP/KIP/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2022 menorehkan hasil yang cukup memuaskan dengan diperolehnya nilai tingkat Keterbukaan Informasi Publik sebesar 76,99 dengan predikat "cukup informatif". Nilai yang diraih sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 11,39 poin atau sebesar 12,89 % dari nilai yang diraih di tahun 2021, jika disandingkan dengan target tahun 2022 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan target yang dijanjikan tercapai dengan realisasi sebesar 90,58 %, namun jika disandingkan dengan target di dalam Dokumen RPJMD dan RENSTRA maka dapat disimpulkan target telah tercapai dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 melakukan penilaian menggunakan 6 (enam) indikator keterbukaan informasi badan publik terhadap tujuh kategori badan publik. Indikator pertama adalah sarana dan prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, serta digitalisasi. Indikator komitmen organisasi merupakan indikator yang sangat penting diantara ke 6 (enam) indikator tersebut sehingga ketidakhadiran pimpinan daerah secara langsung/tanpa diwakili untuk menjelaskan sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat sangat mempengaruhi perolehan Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Selain itu rendahnya kesadaran dari setiap Perangkat Daerah untuk mempublikasikan Program dan Kegiatan serta capaiannya pada masing-masing Website, cukup menyulitkan Tim Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik mendapatkan data dukung berupa *screenshot* pada website masing-masing dinas tentang kebijakan yang sudah dan direncanakan beserta capaiannya. Padahal dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik masyarakat bisa mengetahui pembangunan yang dilakukan pemerintah dan ikut ambil bagian dalam pembangunan tersebut. Selain itu, dengan publikasi ini juga turut mendukung salah satu agenda pembangunan yaitu menjaga stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain beberapa hal di atas, tidak adanya Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik juga ikut mempengaruhi perolehan Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara terhadap pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih skor 77,479 dengan status “cukup”. Perolehan ini mengalami kenaikan sebesar 9,469 poin atau sebesar 1,68 % dari realisasi tahun 2021. Jika disandingkan dengan target tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD, RENSTRA, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dapat disimpulkan target yang dijanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Hal ini disebabkan oleh :

Sebagian besar aspek penyelenggaraan persandian yang meliputi kebijakan, pengembangan SDM, penguatan konfigurasi sistem elektronik, layanan keamanan dan pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tidak dipungkiri dukungan sarana dan prasarana yang belum maksimal, kendala dana dan juga SDM Teknis masih menjadi catatan untuk terus dilakukan perbaikan di tahun – tahun mendatang.

4. Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai walidata daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggungjawab terhadap kualitas data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data statistik sektoral, sesuai Amanah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa walidata daerah adalah Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan daerah bidang statistik.

Untuk memudahkan peran sebagai walidata dan menjawab tuntutan SPBE maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan sistem data dan statistik yang terintegrasi yaitu portal LOPO DARI eNTT (<https://satudatasektoral.nttprov.go.id>). Portal ini telah menyiapkan menu dimana setiap Perangkat Daerah sebagai produsen data wajib mengirimkan data untuk selanjutnya di publikasikan oleh Dinas Kominfo sebagai walidata pada portal LOPO DARI eNTT. Sebagai produsen data setiap Perangkat Daerah wajib menyiapkan data yang memenuhi kaidah Interoperabilitas Data yaitu Data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Dengan demikian dapat disimpulkan target indikator persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi yang tertuang di dalam RPJMD, RENSTRA, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Hal ini disebabkan oleh :

Di dalam tata kelola aplikasi LOPO DARI eNTT telah disediakan user dan password untuk masing-masing Perangkat Daerah sehingga setiap Perangkat Daerah dapat berkontribusi terhadap data dan informasi yang ada di dalam aplikasi ini. Setiap Perangkat Daerah dapat mengirimkan data sesuai format yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga tidak ada lagi keengganan dari Perangkat Daerah untuk mengirimkan data, selain itu karena transaksi data bersifat elektronik maka tidak dibutuhkan biaya dalam mengumpulkan atau pun mengirimkan data.

5. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

Pengukuran capaian indikator Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi menggunakan formula persentase layanan Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga dengan telah disediakannya layanan internet *dedicated* dan layanan *video conference* sepanjang Tahun 2022 terhadap 39 Perangkat Daerah maka dapat disimpulkan target Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD, RENSTRA, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Hal ini disebabkan oleh :

Tersedianya layanan internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi, dimana layanan tersebut terbagi ke dalam layanan *internet dedicated* dan layanan internet *video conference*. Cakupan *layanan internet dedicated* berbanding lurus dengan besaran anggaran yang ada, semakin besar anggaran yang disediakan

maka semakin banyak pula Perangkat Daerah yang memperoleh layanan *internet dedicated*. Sedangkan untuk layanan internet *video conference*, Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan layanan untuk 39 OPD secara gratis. Terhadap setiap permohonan layanan yang diajukan, Dinas Komunikasi dan Informatika selalu menyiapkan dukungan internet, peralatan dan SDM yang akan menyediakan layanan *video conference*.

Layanan internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap seluruh Perangkat Daerah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 18.
Cakupan Layanan Internet Dinas Komunikasi dan Informatika
Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Internet Dedicated	Layanan Internet Video Conference	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
3	Dinas Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
4	Dinas Pemberdaya Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
5	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
6	RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang		✓	
7	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
9	Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
10	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	Penyediaan Layanan Akses Internet Dedicated di Dinas Kominfo, Palapa Room, Ruang Komisi Informasi Prov NTT, Ruang Komisi Penyiaran Informasi Daerah Prov. NTT
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
13	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
15	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	

No.	Nama Perangkat Daerah	Jenis Cakupan Layanan Internet		Keterangan
		Layanan Internet Dedicated	Layanan Internet Video Conference	
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
18	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
23	Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
26	Badan Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
28	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
29	Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	✓	✓	Penyediaan Layanan Akses Internet Dedicated di Ruang Asisten, Ruang Rapat Asisten 1, Ruang Rapat Asisten 2, Ruang Rapat Asisten 3, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Ruang Staf Ahli, Ruang Staf Khusus, Aula Fernandez, Rumah Jabatan, Aula Eltari
30	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
31	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
32	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
33	Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
34	Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
35	Biro Hubungan Masyarakat dan Pertokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
36	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		✓	
37	Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
38	Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	
39	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		✓	

A.5. Permasalahan dan Solusi

A.5.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai Sasaran - Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam Tahun 2022 sebagai berikut:

1. SDM

Sampai saat ini Kualitas dan Kuantitas SDM masih menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian target kinerja utama di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak memenuhi standar akan menghambat bahkan menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas yang telah diisyaratkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 – 2023.

Ketersediaan SDM yang belum memadai disebabkan minimnya pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Padahal pengembangan SDM harusnya menjadi salah satu prioritas dalam birokrasi saat ini apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini dimana terdapat perubahan pola kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Karena itu ASN dituntut beradaptasi dengan pola kerja yang baru dengan meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas serta memprioritaskan penggunaan teknologi.

2. Dana

Secara umum hambatan dan kendala pelaksanaan penggunaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Namun demikian, dengan adanya Refocusing/Rasionalisasi/Realokasi/Redesign anggaran yang terjadi beberapa kali sepanjang tahun anggaran serta adanya kebijakan anggaran yang menolak/menunda pengajuan Ganti Uang (GU) berakibat cukup signifikan terhadap pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Alokasi dana yang sangat minim dan inkonsistensi anggaran dalam pembiayaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo tidak menjadi alasan untuk menurunkan target Indikator Kinerja Utama. Seluruh kegiatan yang ada selalu diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat terjadi karena adanya komitmen dan kesadaran pimpinan dinas dalam menentukan arah dan penerapan kebijakan yang selalu memprioritaskan tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang termuat di dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT). dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Infrastruktur

Berdasarkan kondisi saat ini masalah yang dihadapi oleh Dinas Kominfo adalah belum tersedianya infrastruktur jaringan yang berkualitas berupa cakupan SKPD yang tercover jaringan dan alokasi bandwidth yang memadai. Dengan dana yang ada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya mampu melayani jaringan internet berkualitas yang tersebar di 15 titik.

4. Dukungan perangkat daerah (PPID, e-Absensi, e-Nadi dan TTE)

Kurangnya minat bahkan adanya keengganan dari Perangkat Daerah dalam memanfaatkan aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Dinas Kominfo seperti PPID, eAbsensi, e-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik. Sehingga beberapa Perangkat Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi – aplikasi yang ada seperti jaringan internet, komputer, dan mesin absensi yang sesuai standar. Selain itu masih sangat minimnya SDM yang berperan sebagai operator untuk mengoperasikan e-Absensi, e-Nadi, dan Tanda Tangan Elektronik. Bahkan terdapat keengganan Perangkat Daerah untuk percepatan pelaksanaan Tanda Tangan berbasis Elektronik.

A.5.2 Solusi

Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan internal maupun eksternal, maka solusinya adalah sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan kepada setiap ASN untuk menyalurkan ide dan gagasan, memberi penghargaan serta meningkatkan SDM melalui pelatihan, pendidikan (secara offline dan online), pembinaan, dan penyesuaian sistem kerja;
2. Membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal mendapatkan dukungan terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan berupa sinkronisasi Program/Kegiatan, dukungan data dan informasi maupun kerjasama sebagai narasumber atau tenaga ahli;
3. Menyiapkan jaringan yang berkualitas dari segi cakupan SKPD yang dilayani dan besaran internet yang tersedia dengan mengoptimalkan dana yang ada dengan membagi layanan internet ke dalam layanan *internet dedicated* dan layanan *video conference* dimana besaran alokasi jaringan internet bersifat *unlimited*;
4. Menyusun dan menetapkan berbagai regulasi terkait SPBE dan Keterbukaan Informasi Publik serta membangun kemitraan dengan *stakeholder* terkait.

A.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 19.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD	APBD PERUBAHAN		
	TOTAL	13.375.700.352	12.015.006.801	88 ASN	
1. Nilai Pelaksanaan SAKIP 2. Nilai PMPRB 3. Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001:2015 4. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP 5. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP 6. Pelaksanaan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9,698,025,792	8,479,538,572	1. Sekretaris : 1 Orang 2. Perencana Ahli Muda : 1 Orang 3. Kasubag Kepum : 1 Orang 4. Kasubag Keuangan : 1 Orang 5. Pranata Kearsipan : 1 Orang 6. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris : 1 Orang 7. Pustakawan Ahli Muda : 1 Orang 8. Analis Kinerja : 1 Orang 9. Bendahara : 1 Orang 10. Bendahara Penerimaan : 1 Orang 11. Pejabat Pelaksana : 2 Orang 12. Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan : 1 Orang 13. Bendahara Gaji : 1 Orang 14. Analis Data dan Informasi : 1 Orang 15. Pengadministrasi Umum : 2 Orang 16. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor : 1 Orang 17. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana : 1 Orang	1. Laptop : 7 Unit 2. LCD : 6 Unit 3. HP : 1 Unit 4. PC/Komputer : 14 Unit 5. CCTV 8 chanel : 1 Unit 6. Printer : 12 Unit 7. Resiver Parabola : 1 Unit 8. Webcam : 2 Unit 9. Infocus : 3 Unit 10. HDD : 2 Unit 11. UPS : 4 Unit 12. Scanner : 1 Unit 13. Stavol : 3 Unit 14. Handycam : 1 Unit 15. Proyektor : 2 Unit 16. Resiver CCTV : 1 Unit
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146,740,800	130,440,800		
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,999,900	9,999,900		
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,999,900	6,999,900		
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34,741,100	34,741,100		
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94,999,900	78,699,900		
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,286,460,282	7,225,574,600		

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD	APBD PERUBAHAN		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,176,461,682	7,115,576,000	18. Pengadministrasi Kepegawaian : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99,998,700	99,998,700	19. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,999,900	9,999,900	20. Pramu Kebersihan : 4 Orang	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59,999,600	46,359,600	21. Pramu Bakti : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	39,999,800	26,359,800	22. Pranata Humas Ahli Pertama : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19,999,800	19,999,800	23. Analis Teknologi Informasi: 1 Orang	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	278,736,800	237,199,152	24. Pengelola Teknologi Informasi: 2 Orang	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,998,800	19,998,800	25. Pengelola Dokumentasi: 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,979,600	19,375,752	26. Pengadministrasi TU Pimpinan: 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,999,800	34,999,800	26. Tenaga Pengamanan Kantor: 1 Orang	
				27. Pengemudi: 1 Orang	

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD	APBD PERUBAHAN		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,785,000	2,251,200		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	39,998,800	39,998,800		
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,993,000	9,993,000		
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79,981,800	79,981,800		
	Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45,000,000	30,600,000		
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73,699,890	0		
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73,699,890	0		
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659,915,720	659,915,720		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,996,800	7,996,800		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,945,000	149,945,000		

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD	APBD PERUBAHAN		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	501,973,920	501,973,920		
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192,472,700	180,048,700		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oper./Lapangan	99,993,700	99,993,700		
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44,980,000	44,980,000		
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47,499,000	35,075,000		
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,582,914,700	1,501,988,200	1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Humas Ahli Muda : 2 Orang 3. Analis Konten Media Sosial : 1 Orang 4. Analis Pengelolaan Media Informasi: 1 Orang 5. Pranata Humas Ahli Pertama: 1 Orang 6. Pengemudi : 2 Orang 7. Pengelola Teknologi Informasi: 1 Orang 8. Analis Hukum: 1 Orang	<u>Bidang PIKP :</u> 1. PC/Komputer : 4 Unit 2. Printer : 4 Unit 3. Laptop : 2 Unit 4. Laptop : 1 Unit 5. Kamera Shooting : 1 Unit 6. Monopod : 1 Unit 7. Kamera foto : 1 Unit 8. Flash Kamera : 1 Unit 9. Lensa Tele : 1 Unit 10. Memori Card 16 : 1 Unit
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1,582,914,700	1,501,988,200		
	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	149,997,800	117,050,300		
	Sub Kegiatan: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	93,426,400	53,447,400		

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD	APBD PERUBAHAN		
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	22,996,000	22,996,000	9. Penyusun Bahan Informasi dan Komunikasi: 1 Orang	11. Baterai Cadangan camcorder : 1 Unit 12. UPS : 1 Unit 13. Televisi : 1 Unit
	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	94,227,000	86,227,000		KPID : 1. PC/Komputer : 3 Unit 2. UPS : 2 Unit 3. Laptop : 2 Unit 4. Printer : 1 Unit
	Sub Kegiatan: Layanan Hubungan Media	37,416,100	37,416,100		KI : 1. Komputer : 1 Unit 2. Printer : 1 Unit
	Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	102,583,700	102,583,700		
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1,082,267,700	1,082,267,700		
- Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Provinsi NTT. -Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,724,626,060	1,591,470,329	<u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 2 Orang 3. Pranata Humas Muda : 1 Orang 4. Analisi Penerapan Aplikasi dan Konten 5. Pengadministrasi Umum : 1 Orang 6. Pengelola Database : 1 Orang 7. Pranata Komputer : 1 Orang 8. Pranata Humas Ahli Pertama : 1 Orang 9. Perancang Grafis : 1 Orang	<u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Komputer/PC : 7 Unit 2. Scanner : 1 Unit 3. Printer : 1 Unit 4. UPS : 14 Unit 5. Printer : 1 Unit 6. Laptop : 2 Unit 7. Televisi : 1 Unit 8. Server : 5 Unit 9. Stovol : 1 Unit 10. HDD : 1 Unit 11. Stabilizer : 3 Unit 12. RAM Server : 1 Unit
	Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	241,075,560	181,464,960		
	Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	130,859,000	119,759,000		
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan	110,216,560	61,705,960		

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD	APBD PERUBAHAN		
	Intra Pemerintah Daerah				
	Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1,483,550,500	1,410,005,369	10. Pengelola Teknologi Informasi : 1 Orang 11. Pranata Teknologi Komputer : 1 Orang	<u>Bidang Pelayanan Infrastruktur:</u> 1. Laptop : 3 Unit 2. Printer : 5 Unit 3. Switch 16 Volt : 5 Unit 4. Monitor : 2 Unit 5. Router : 1 Unit 6. PC/Komputer : 1 Unit
	Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	226,382,600	195,882,600	<u>Bidang Pelayanan Infrastruktur :</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	45,746,600	22,153,600	3. Pengendali Teknologi Informasi : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	170,391,900	231,058,900	4. Pengendali Jaringan Komunikasi : 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1,041,029,400	960,910,269	5. Penyusun Standar Teknologi Informasi : 1 Orang 6. Pengadministrasi Umum : 2 Orang 7. Penelaah Program, Data dan Evaluasi: 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				
Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	99,999,800	257,213,700	1. Kasie Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral : 1 Orang	1. PC/ Komputer : 2 Unit 2. Laptop : 1 Unit 3. Printer : 1 Unit
	Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	99,999,800	257,213,700	2. Analis Data Standarisasi : 1 Orang 3. Pengadministrasi: 1 Orang	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	61,820,600	23,220,600	4. Pengelola Data Statistik Sektoral: 1 Orang	

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENGUNAAN SUMBER DAYA			
		ANGGARAN		SDM	SARANA/PRASARANA
		APBD	APBD PERUBAHAN		
	Sub Kegiatan: Membangun Metadata Statistik Sektoral	31,300,200	227,114,100		
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	6,879,000	6,879,000		
Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	270,134,000	184,796,000	1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Manggala Informatika : 3 Orang 3. Pejabat Pelaksana : 1 Orang 4. Pengadministrasi Umum : 9 Orang 5. Pranata Komputer : 1 Orang	1. Laptop : 1 Unit 2. PC/Komputer : 4 Unit 3. UPS : 1 Unit 4. Printer : 3 Unit 5. HDD : 1 Unit
	Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	245,184,200	159,846,200		
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	151,877,400	78,566,400		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	93,306,800	81,279,800		
	Kegiatan: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	24,949,800	24,949,800		
	Sub Kegiatan: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	24,949,800	24,949,800		

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, dirumuskan Program dan Kegiatan yang berpedoman dan mendukung tercapainya Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai RPJMD, RENSTRA, RKT, dan PK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel. 20

Analisis Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
			APBD	APBD PERUBAHAN
TOTAL PAGU ANGGARAN			13,375,700,352	12,015,006,801
1. Nilai Pelaksanaan SAKIP 2. Nilai PMPRB 3. Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001:2015 4. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP 5. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP 6. Pelaksanaan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		9,698,025,792	8,479,538,572
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas	146,740,800	130,440,800
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	9,999,900	9,999,900
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,999,900	6,999,900
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah LKPJ 2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala 3. Jumlah LKIP 4. Jumlah LPPD	34,741,100	34,741,100
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan evaluasi berkala 2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 3. Terpenuhinya kualifikasi ISO 9001:2015	94,999,900	78,699,900
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi keuangan yang berkualitas dan bebas gratifikasi	8,286,460,282	7,225,574,600
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	8,176,461,682	7,115,576,000
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan pengeloaan BMD	99,998,700	99,998,700

	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	9,999,900	9,999,900
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	59,999,600	46,359,600
	Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang berkinerja	39,999,800	26,359,800
	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang berkompetensi	19,999,800	19,999,800
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	278,736,800	237,199,152
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	19,998,800	19,998,800
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	39,979,600	19,375,752
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	34,999,800	34,999,800
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8,785,000	2,251,200
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor yang disediakan	39,998,800	39,998,800
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	9,993,000	9,993,000
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	79,981,800	79,981,800
	Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Artikel/Berita yang di upload Website PPID Pembantu	45,000,000	30,600,000
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	73,699,890	0
	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	73,699,890	0
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang berkualitas	659,915,720	659,915,720

	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	7,996,800	7,996,800
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia	149,945,000	149,945,000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir	501,973,920	501,973,920
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional yang tersedia	192,472,700	180,048,700
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang jasa pemeliharaan dan perizinannya telah tersedia	99,993,700	99,993,700
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	44,980,000	44,980,000
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	47,499,000	35,075,000
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		1,582,914,700	1,501,988,200
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik pemerintah provinsi NTT	1,582,914,700	1,501,988,200
	Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Rekomendasi	149,997,800	117,050,300
	Sub Kegiatan: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Frekwensi dialog interaktif radio	93,426,400	53,447,400
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat	22,996,000	22,996,000
	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	1. Jumlah Kegiatan Evaluasi Indeks KIP 2. Jumlah Forum Komunikasi PPID 3. Jumlah Sosialisasi keterbukaan KIP 4. Jumlah Kegiatan Pengelolaan PPID	94,227,000	86,227,000

	Sub Kegiatan: Layanan Hubungan Media	Jumlah Kegiatan Jumpa Pers Jurnalis bagi Wartawan dan PNS	37,416,100	37,416,100
	Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Kab/Kota	102,583,700	102,583,700
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1. Jumlah Kegiatan Rekrutmen KPID NTT 2. Jumlah kegiatan operasional KI dan KPID1	1,082,267,700	1,082,267,700
Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		1,724,626,060	1,591,470,329
	Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Sub Domain, Webmail, Website nttprov dan Website Dinas	241,075,560	181,464,960
Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi.	Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan website nttrov.go.id	130,859,000	119,759,000
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Jumlah Kegiatan Bimtek Administrator Jaringan LAN 2. Jumlah peralatan pendukung Video Conference	110,216,560	61,705,960
	Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi	1,483,550,500	1,410,005,369
	Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Jumlah Kegiatan evaluasi indeks SPBE 2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Internalisasi Peraturan Gubernur 3. Jumlah dokumen Arsitektur SPBE	226,382,600	195,882,600
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase pendataan pembangun BTS dan layanan internet Kab/Kota	45,746,600	22,153,600
	Sub Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Jumlah pengembangan e-Absensi 2. Jumlah pengembangan e-Nadi dan TTE 3. Jumlah pengembangan Webmail	170,391,900	231,058,900
	Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Jumlah layanan internet bagi PD 2. Jumlah layanan Video Conference bagi PD	1,041,029,400	960,910,269

Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		99,999,800	257,213,700
	Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyediaan dan pengelolaan data sektoral melalui aplikasi	99,999,800	257,213,700
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1. Jumlah kegiatan Bimtek Penginputan Data Sektoral 2. Jumlah kegiatan pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral	61,820,600	23,220,600
	Sub Kegiatan: Membangun Metadata Statistik Sektoral	1. Jumlah aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT 2. Jumlah pengelolaan data melalui layanan VPN	31,300,200	227,114,100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral tingkat Kab/Kota	6,879,000	6,879,000
Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		270,134,000	184,796,000
	Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	245,184,200	159,846,200
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1. Jumlah Audit Internal penyelenggaraan persandian 2. Jumlah monev penyelenggaraan persandian pemerintah daerah	151,877,400	78,566,400
	Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Jumlah dilakukannya hardening aplikasi lingkup Pemprov NTT 2. Jumlah pengujian Aplikasi/ITSA di PD 3. Jumlah peralatan persandian	93,306,800	81,279,800
	Kegiatan: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah lingkup Provinsi	24,949,800	24,949,800
	Sub Kegiatan: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Pengelolaan email Sanapati 2. Jumlah kegiatan pengelolaan email Sanapati	24,949,800	24,949,800

B. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan / Dana sebagai salah satu sub dalam kelompok kinerja sasaran, yakni: Indikator Kinerja Input, digunakan untuk membiayai kegiatan baik pendapatan, maupun belanja. dalam rangka Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022. Keseluruhan Anggaran / Dana berasal dari APBD Provinsi NTT, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2022, yang dapat dilaporkan alokasi dan realisasinya sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Tabel. 21
Tabel Realisasi Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,-	62.500.000,-	104,17
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,-	62.500.000,-	104,17
	- Retribusi Pemakaian Ruang	20.000.000	36.500.000	182,50
	- Retribusi Pemakaian Alat	40.000.000	26.000.000	65,00

Obyek retribusi yang menjadi andalan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pemanfaatan ruangan aula pertemuan dan sarana prasarana TIK. Sehubungan dengan adanya *redesign* anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/virtual sehingga pemakaian aula dan pemakaian peralatan TIK untuk rapat/kegiatan secara virtual cukup diminati sehingga pendapatan tahun anggaran 2022 dapat terealisasi melebihi target yang ditetapkan atau dapat dikatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.9.500.000,- atau ada peningkatan sebesar 17,92% dari realisasi periode 2021.

II. BELANJA

Tabel. 22

Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

NO	KELOMPOK BELANJA	RENCANA / ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	11.778.348.881	10.056.845.637	1.721.503.244	85,38
	1.1 Belanja Pegawai	7.185.986.000	6.073.682.944	1.112.303.056	84,52
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	4.913.111.015	4.700.950.927	212.160.088	95,68
	- Belanja Tambahan Penghasilan	2.200.664.985	1.300.522.017	900.142.968	59,10
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	72.210.000	72.210.000	0	100
	1.2 Belanja Barang dan Jasa	3.592.362.881	2.983.162.693	609.200.188	83,04
	- Belanja Barang	445.739.021	322.653.501	123.085.520	72,39
	- Belanja Jasa	2.658.517.720	2.313.825.297	344.692.423	87,03
	- Belanja Pemeliharaan	139.629.140	79.917.000	59.712.140	57,24
	- Belanja Perjalanan Dinas	348.477.000	266.766.895	81.710.105	76,55
	1.3 Belanja Hibah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100
	- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum	1.000.000.000	1.000.000.000	0	100
2	Belanja Modal	236.657.920	205.297.076	31.360.844	86,75
	2.1 Peralatan dan Mesin	220.935.880	189.575.036	31.360.844	85,81
	- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	947.800	0	947.800	0
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.523.220	6.411.364	111.856	98,29
	- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.336.400	41.336.400	0	100
	- Belanja Modal Komputer	172.128.460	141.827.272	30.301.188	82,40
	2.2 Modal Aset Tetap Lainnya	15.722.040	15.722.040	0	100
	- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.722.040	15.722.040	0	100
	JUMLAH	12.015.006.801	10.262.142.713	1.752.864.088	85,41

Penyetoran kembali sebesar Rp. 107.540,-

Dari tabel diatas, dapat tergambar Realisasi penyerapan anggaran mencapai 85,51% hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan tidak dibayarkannya 4 (empat) bulan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS.
2. Tambahan Penghasilan hanya direalisasi sebesar 59,10%.
3. Tidak direalisasinya Belanja Barang, Jasa, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas dan Belanja Modal akibat adanya Refocusing/Rasionalisasi/Realokasi/Redesign anggaran yang terjadi beberapa kali sepanjang tahun anggaran serta adanya kebijakan anggaran yang menolak/menunda pengajuan Ganti Uang (GU).

Tabel. 23
Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan

Terhadap belanja dapat dirincikan sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI					
		FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		100%	100%	98,12%	12.015.006.801	10.262.142.713	85,41%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai Pelaksanaan SAKIP 2. Nilai PMPRB 3. Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001:2015 4. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP 5. Penyampaian LKPD,LPPD/LKPJ,LKIP 6. Pelaksanaan Anggaran	1. BB 2. A 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 85 %	1. BB (87,2) 2. A (92,76) 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 85,41%	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 5. 100 6.100	8.479.538.572	7.162.761.958	84,47
Kegiatan : Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	100	130.440.800	116.543.500	89,35
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	100	9.999.900	8.424.000	82,24
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6 Dokumen	100	6.999.900	6.576.000	93,94
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah LKPJ 2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala 3. Jumlah LKIP 4. Jumlah LPPD	1. Jumlah LKPJ 2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala 3. Jumlah LKIP 4. Jumlah LPPD	1. 1 Laporan 2. 17 Laporan 3. 1 Laporan 4. 1 Laporan	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	34.741.100	34.211.100	98,47
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan evaluasi berkala 2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. 16 Laporan 2. 80 Nilai	1. 16 Laporan 2. 80 Nilai	1. 100 2. 100	78.699.900	67.332.400	85,56

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI					
		FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	3. Terpenuhinya kualifikasi ISO 9001:2015	3. 1 Sertifikat	3. 1 Sertifikat	3. 100			
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi keuangan yang berkualitas dan bebas gratifikasi	100%	100%	100	7.225.574.600	6.112.351.644	84,59
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	72 Orang	72 Orang	100	7.115.576.000	6.003.272.944	84.37
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD	36 Dokumen	36 Dokumen	100	99.998.700	99.998.700	100.00
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	17 Laporan	17 Laporan	100	9.999.900	9.080.000	90.80
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	100%	100	46.359.600	17.325.700	37.37
Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang berkinerja	88 ASN	88 ASN	100	26.359.800	6.600.000	25.04
Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang berkompetensi	88 ASN	88 ASN	100	19.999.800	10.725.700	53.63
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	100%	100	237.199.152	150.485.695	63,44
Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100	19.998.800	6.863.000	34.32

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI					
		FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100	19.375.752	0	0
Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100	34.999.800	29.718.900	84,91
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100	2.251.200	2.040.000	90,62
Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	100	39.998.800	32.605.400	81,52
Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	100	9.993.000	7.600.000	76,05
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	79.981.800	53.658.395	67,09
Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Artikel/Berita yang di upload Website PPID Pembantu	12 Berita	12 Berita	100	30.600.000	18.000.000	58,82
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0	0
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	0	0	0	0
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang berkualitas	100%	100%	100	659.915.720	646.079.862	97,90

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI					
		FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	12 Paket	12 Paket	100	7.996.800	4.000.000	50,02
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 Paket	12 Paket	100	149.945.000	145.742.342	97,20
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir	19 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	100	501.973.920	496.337.520	98,80
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional yang tersedia	100%	100%	100	180.048.700	119.975.557	66,64
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang jasa pemeliharaan dan perizinannya telah tersedia	5 Unit	5 Unit	100	99.993.700	82.218.557	82,22
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	12 Paket	12 Paket	100	44.980.000	22.335.000	49,66
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	12 Unit	Unit	100	35.075.000	15.422.000	43,97
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	85	76,99	90,56	1.501.988.200	1.426.899.400	95
Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kegiatan evaluasi tingkat keterbukaan informasi publik pemerintah provinsi NTT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.501.988.200	1.426.899.400	95

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI					
		FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Rekomendasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	117.050.300	104.018.900	88,87
Sub Kegiatan: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Frekwensi dialog interaktif radio	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66,67	53.447.400	35.421.000	66,27
Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Iklan Layanan Masyarakat	5 Iklan	2 Iklan	40	22.996.000	8.935.000	38,85
Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	1. Jumlah Kegiatan Evaluasi Indeks KIP 2. Jumlah Forum Komunikasi PPID 3. Jumlah Sosialisasi keterbukaan KIP 4. Jumlah Kegiatan Pengelolaan PPID	1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 12 Kegiatan	1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Kegiatan 4. 12 Kegiatan	100	86.227.000	60.671.000	70,36
Sub Kegiatan: Layanan Hubungan Media	Jumlah Kegiatan Jumpa Pers Jurnalis bagi Wartawan dan PNS	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	37.416.100	37.416.100	100
Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Kab/Kota	3 Kabupaten	3 Kabupaten	100	102.583.700	99.521.700	97,02
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media dan Kemitraan Komunitas	1. Jumlah Kegiatan Rekrutmen KPID NTT 2. Jumlah kegiatan operasional KI dan KPID1	1. 1 Kegiatan 2. 12 Kegiatan	1. 1 Kegiatan 2. 12 Kegiatan	100	1.082.267.700	1.080.915.700	99,88
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT. 2. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.	1. 2,5 Indeks 2. 100 %	1. 3,35 Indeks 2. 100 %	1. 100 2. 100	1.591.470.329	1.351.300.293	84,91

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI					
		FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Sub Domain, Webmail, Website ntprov dan Website Dinas	100%	100%	100	181.464.960	97.288.704	53,61
Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jangka waktu pengelolaan website ntprov.go.id	12 Bulan	12 Bulan	100	119.759.000	37.192.700	31,06
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Jumlah Kegiatan Bimtek Administrator Jaringan LAN 2. Jumlah peralatan pendukung Video Conference	1. 1 Kegiatan 2. 1 Unit	1. 1 Kegiatan 2. 1 Unit	100	61.705.960	60.096.004	97,39
Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi	100%	100%	100	1.410.005.369	1.254.011.589	88,94
Sub Kegiatan: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Jumlah Kegiatan evaluasi indeks SPBE 2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Internalisasi Peraturan Gubernur 3. Jumlah dokumen Arsitektur SPBE	1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Dokumen	1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan 3. 1 Dokumen	100	195.882.600	142.001.000	72,49
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase pendataan pembangun BTS dan layanan internet Kab/Kota	100%	100%	100	22.153.600	11.608.400	52,40
Sub Kegiatan: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Jumlah pengembangan e-Absensi 2. Jumlah pengembangan e-Nadi dan TTE 3. Jumlah pengembangan Webmail	1. 1 Aplikasi 2. 1 Aplikasi 3. 1 Aplikasi	1. 1 Aplikasi 2. 1 Aplikasi 3. 1 Aplikasi	100	231.058.900	145.647.000	63,03

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI					
		FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Jumlah layanan internet bagi PD 2. Jumlah layanan Video Conference bagi PD	1. 5 PD 2. 39 PD	1. 5 PD 2. 39 PD	100	960.910.269	954.755.189	99,36
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	75%	100%	100	257.213.700	218.613.061	84,99
Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyediaan dan pengelolaan data sektoral melalui aplikasi	100%	100%	100	257.213.700	218.613.061	84,99
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1. Jumlah kegiatan Bimtek Penginputan Data Sektoral 2. Jumlah kegiatan pengelolaan dan penyusunan data statistic sektoral	1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan	1. 1 Kegiatan 2. 1 Kegiatan	100	23.220.600	10.846.700	46,71
Sub Kegiatan: Membangun Metadata Statistik Sektoral	1. Jumlah aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT 2. Jumlah pengelolaan data melalui layanan VPN	1. 1 Aplikasi 2. 9 Bulan	1. 1 Aplikasi 2. 9 Bulan	100	227.114.100	202.436.362	89,13
Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pembinaan dan penyelenggaraan statistic sektoral tingkat Kab/Kota	1. Kabupaten	1. Kabupaten	100	6.879.000	5.330.000	77,48
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76	77,479	100	184.796.000	102.568.000	55,50
Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	100%	100%	100	159.846.200	94.768.000	59,29

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI					
		FISIK			KEUANGAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1. Jumlah Audit Internal penyelenggaraan persandian 2. Jumlah monev penyelenggaraan persandian pemerintah daerah	1. 1 Kali 2. 2 Kali	1. 1 Kali 2. 2 Kali	100	78.566.400	65.990.200	83,99
Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Jumlah dilakukannya hardening aplikasi lingkup Pemprov NTT 2. Jumlah pengujian Aplikasi/ITSA di PD 3. Jumlah peralatan persandian	1. 1 Kali 2. 1 Kali 3. 1 Unit	1. 1 Kali 2. 1 Kali 3. 1 Unit	1. 0 2. 100 3. 0	81.279.800	28.777.800	35,41
Kegiatan: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah lingkup Provinsi	100%	100%	0	24.949.800	7.800.000	31,26
Sub Kegiatan: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Email Sanapati 2. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Email Sanapati	1. 50 Orang 2. 12 Kegiatan	1. – Orang 2. 12 Kegiatan	1. 0 2. 100	24.949.800	7.800.000	31,26

Dana yang digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal sesungguhnya sudah lebih fokus untuk dapat menyajikan seberapa besar tingkat capaian sasaran yang didasarkan pada tolok ukur kinerja. Meskipun demikian akuntabilitas keuangan belum dapat disajikan secara sempurna berdasarkan sasaran - sasaran strategis. Dengan perkataan lain aspek keuangan yang disajikan dalam Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan gambaran sebagai data keuangan yang dikelola sesuai rencana / alokasi dana / anggaran pada program kegiatan serta realisasi pelaksanaan sesuai realisasi program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari uraian - uraian pada bab - bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang dibuat sebagai kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Provinsi NTT ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selama Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program kerja seperti yang tercantum dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, RENSTRA Perubahan Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi ;
3. Terbatasnya alokasi dana/anggaran dan adanya Refocusing/Rasionalisasi/Realokasi/Redesign anggaran yang terjadi selama beberapa kali sepanjang tahun anggaran berakibat cukup signifikan terhadap pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tetapi tidak menyurutkan semangat Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi target yang telah diperjanjikan.
4. Dari Pengukuran/Penilaian yang dilakukan terhadap Sasaran Strategis, tingkat capaian menunjukkan keberhasilan yang sangat memuaskan dan diharapkan akan semakin baik lagi di Tahun 2023.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka diajukan beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Dana

Perlunya dukungan dana dalam membiayai Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo sehingga tidak ada lagi Program dan Kegiatan yang tidak diakomodir atau tidak memenuhi target sasaran kinerja yang direncanakan.

2. Infrastruktur

Jangkauan infrastruktur TIK yang belum optimal sangat mempengaruhi efektivitas SPBE dimana tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. Untuk menyediakan jaringan internet yang berkualitas diperlukan dukungan dana yang juga memadai dari Pemerintah Daerah.

3. SDM

Untuk meningkatkan kualitas SDM setidaknya ada beberapa cara, antara lain melalui jalur Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Dalam era digitalisasi ini peningkatan kualitas SDM dapat memanfaatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal juga peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi yang secara aktif mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government. Hal ini hanya bisa terwujud jika ada dukungan dana yang memadai.

4. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, SDM, biaya, termasuk regulasi.

5. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan

Sampai saat ini SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

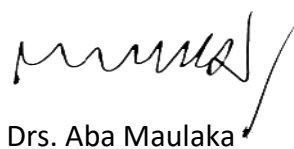


Drs. ABA MAULAKA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196302051986031031

Lembar Verifikasi Level 1 LKIP 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Fungsional Perencana Muda 22/01/2023	1. Verifikasi data realisasi dan data dukung 2. Verifikasi nilai capaian, realisasi target kinerja, belanja dan pendapatan
2.	Sekretaris 22/01/2023	1. Cermati visi dan misi, sesuaikan dengan RPJMD 2. Cermati target RPJMD, RENSTRA, IKU dan PK agar disinkronkan antar bagian 3. Catatan perbaikan redaksional 4. Verifikasi target dan capaian baik angka maupun satuan
3.		

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Aba Maulaka
Pembina Utama Madya
NIP. 19630205 198603 1 031

LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DRS. ABA MAULAKA**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

16 NOVEMBER 2022

 Pihak Kedua

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

 Pihak Pertama, 

DRS. ABA MAULAKA



LAMPIRAN:

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.	Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	2,28 Index point	2,5 Index point	Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan x 100 Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada akhir RENSTRA
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	88,38	85	Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada tahun berjalan x 100 Nilai keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada akhir RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
		Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	68,01	76 atau 4	$\frac{\text{Nilai Tingkat Pengamanan Informasi daerah yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai Tingkat Pengamanan Informasi daerah yang direncanakan pada akhir RENSTRA}} \times 100$
		Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	75%	$\frac{\text{Persentase sistem data statistik terintegrasi yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Persentase sistem data statistik terintegrasi yang direncanakan pada akhir RENSTRA}} \times 100$
		Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi	100 %	100 %	$\frac{\text{Persentase layanan jaringan LAN dan Intranet terintegrasi di PD yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Persentase layanan jaringan LAN dan Intranet terintegrasi di PD yang direncanakan pada akhir RENSTRA}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 11.572.997.101,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.479.538.572,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.501.988.200,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.591.470.329,-	Realisasi minimal 85%
	4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 257.213.700,-	Realisasi minimal 85%
	5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 184.796.000,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 60.000.000,-	Realisasi minimal 90%
2)	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		
	1. -	Rp. -	
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	Realisasi minimal 90%

C. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100%, kecuali terdapat kendala yang dapat dipertanggungjawabkan;

D. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);

F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90);

G. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;

H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:

1. TL temuan di bawah tahun 2020; Administrasi 100 %, Non Administrasi minimal 75 %;
2. TL temuan di atas tahun 2020; Administrasi/Non Administrasi 90-100 %;

- I. Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001: 2015;
- J. Jumlah Inovasi Minimal 5 (lima) jenis;
- K. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi e-NADI paling lambat Tanggal 1 Maret 2022;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (75);
- N. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.

16 NOVEMBER 2022


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

DRS. ABA MAULAKA